

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PT. LAMPUNG JASA UTAMA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh:

OCKTA DHEA ARIESCA

PT. Lampung Jasa Utama merupakan salah satu BUMD yang kurang berkontribusi terhadap PAD di Provinsi Lampung. Kebijakan yang dilaksanakan PT. Lampung Jasa Utama dalam meningkatkan PAD merujuk pada PP No 54 Tahun 2017 Pasal 2 Tentang Kebijakan BUMD, namun sampai saat ini kebijakan tersebut belum memberikan hasil yang signifikan.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi kebijakan PT. Lampung Jasa Utama dalam meningkatkan PAD di Provinsi Lampung. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PT. Lampung Jasa Utama belum dapat berkontribusi terhadap PAD di Provinsi Lampung. Hal ini diketahui berdasarkan indikator komunikasi, PT. Lampung Jasa Utama melakukan kerjasama di beberapa bidang bisnis dengan melakukan komunikasi internal dan eksternal perusahaan. Pada indikator sumber daya, PT. Lampung Jasa Utama mempersiapkan aspek yang berkaitan dengan sarana dan prasarana dalam melakukan usaha di tengah keterbatasan yang ada. Pada indikator disposisi, terdapat penyelewengan dana penyertaan modal BUMD yang diterima PT. Lampung Jasa Utama. Dan indikator struktur birokrasi, PT. Lampung Jasa Utama memastikan pegawai memahami dan taat terhadap SOP yang telah diberlakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI) yang terlihat berdasarkan kinerja pegawai. Berdasarkan keempat indikator tersebut, PT. Lampung Jasa Utama belum mampu memberikan kontribusinya berupa deviden ke Pemerintah Provinsi Lampung, dengan kondisi yang belum stabil perusahaan menggunakan keuntungan sebagai dana operasional perusahaan karena perusahaan sudah tidak mendapat penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Lampung sejak 2019.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Badan Usaha Milik Daerah, Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION POLICY OF PT. LAMPUNG JASA UTAMA IN INCREASING REGIONAL ORIGINAL INCOME IN LAMPUNG PROVINCE

By

OCKTA DHEA ARIESCA

PT. Lampung Jasa Utama is one of the BUMDs that does not contribute enough to PAD in Lampung Province. The policies implemented by PT. Lampung Jasa Utama in increasing PAD refers to PP No. 54 of 2017 Article 2 concerning BUMD Policy, but to date this policy has not provided significant results.

The aim of this research is to determine the implementation of PT policies. Lampung Main Service in increasing PAD in Lampung Province. This research was conducted using qualitative methods with data collection techniques through interviews, documentation and observation.

The results of this research show that the implementation of PT policies. Lampung Jasa Utama has not been able to contribute to PAD in Lampung Province. This is known based on communication indicators, PT. Lampung Jasa Utama collaborates in several business fields by carrying out internal and external company communications. In resource indicators, PT. Lampung Jasa Utama prepares aspects related to facilities and infrastructure for conducting business amidst existing limitations. In the disposition indicator, there was misappropriation of BUMD capital participation funds received by PT. Lampung Main Services. And indicators of bureaucratic structure, PT. Lampung Jasa Utama ensures that employees understand and obey the SOPs that have been implemented based on their respective main duties and functions based on Key Performance Indicators (KPI) which are visible based on employee performance. Based on these four indicators, PT. Lampung Jasa Utama has not been able to contribute in the form of dividends to the Lampung Provincial Government, due to unstable conditions the company uses profits as company operational funds because the company has not received capital participation from the Lampung Provincial Government since 2019.

Keywords: Implementation Policy, Regional Owned Enterprises, Regional Original Income.